

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia memiliki luas daratan dan lautan sebesar 7,7 juta km² yang terdiri dari 17.500 pulau dengan panjang garis pantai mencapai 81.000 km. Garis pantai yang cukup panjang ini mempunyai potensi ekonomi yang cukup besar. Selain itu, sekitar 75% wilayah Indonesia terdiri atas laut dan perairan pantai. Sekitar 3,1 juta km² merupakan laut territorial dan 2,7 juta km² berupa Zone Ekonomi Eksklusif (ZEE). Sumberdaya wilayah pesisir dan laut merupakan sumberdaya yang bersifat *open acces* dan *common property*. Berdasarkan hal ini, setiap orang berhak untuk memanfaatkannya dengan tujuan memperoleh nilai atau keuntungan ekonomi (Christy dan Scott, 1966 Odum, 1983 dalam Kaswadji, 2001).

Wilayah pesisir pantai Indonesia banyak dimanfaatkan untuk areal pertambakan, pelabuhan, budidaya perikanan dan industri pariwisata. Pemanfaatan wilayah pesisir yang melewati batas maksimalnya telah mengakibatkan rusaknya ekosistem pesisir pantai, khususnya kerusakan hutan mangrove.

Hutan mangrove merupakan tempat penyedia *nutrient* terbesar di lingkungan eustaria. Beberapa jenis ikan memijahkan telurnya di hutan mangrove. Hutan mangrove juga merupakan tempat berkembang biak dan habitat bagi beberapa

jenis ikan dengan nilai ekonomis tinggi. Selain sebagai tempat yang menyediakan sumber makanan baik berupa phytoplankton dan zooplankton, hutan mangrove juga berfungsi sebagai penahan intrusi air laut lebih jauh ke daratan (Kusmana, 2003) dan penahan abrasi pantai (Yudha, 2007).

Kerusakan ekosistem pesisir pantai menyebabkan rusaknya bentuk profil pantai, perubahan pola kehidupan nelayan, menurunnya sumber daya laut dan hasil tangkapan nelayan. Syafikri (2009) yang melakukan penelitian di perairan Pantai Semarang menyimpulkan bahwa deforestasi mangrove telah menurunkan hasil tangkapan sebesar 263.519 kg pada tahun 2003 menjadi 14.996 kg pada tahun 2006, atau terjadi penurunan rata-rata 31,4 % per tahun.

Pemerintah menyadari bahwa konservasi ekosistem pesisir perlu dilakukan. Namun demikian, oleh karena keterbatasan dana dan pertimbangan kepentingan, konservasi ini hanya berupa proyek-proyek pemberian bibit mangrove tanpa didukung kegiatan atau dana pemeliharannya. Akibatnya, banyak proyek penghijauan pesisir pantai kurang berhasil guna.

Selain rusaknya ekosistem pesisir pantai, nelayan juga dirugikan dengan adanya kebijakan pemerintah yang mempersempit areal penangkapan. Sebagai contoh, adanya larangan menangkap ikan di suatu perairan yang diperuntukkan bagi suatu perusahaan atau instansi pemerintah. Kondisi ini mengakibatkan menurunnya hasil tangkapan nelayan. Akibat selanjutnya adalah turunnya pendapatan nelayan. Kondisi ini akan lebih parah bagi nelayan tradisional. Mereka mencari ikan tidak jauh dari pantai karena mereka menggunakan alat yang masih tradisional seperti jukung, pancing, jaring dan bubu.

B. Perumusan Masalah

Kalianda merupakan salah satu kecamatan yang berada di pantai barat Kabupaten Lampung Selatan. Bentuk topografi dan potensi pesisir yang begitu besar di perairan pantai Kalianda menarik para investor untuk menanamkan modalnya. Pembangunan industri pariwisata bertaraf internasional, perusahaan besar pembenihan udang, pertambakan dan budidaya perikanan yang tidak proporsional telah merusak sebagian besar ekosistem mangrove dan mempercepat abrasi air laut ke darat. Kondisi ini dapat memberikan dampak buruk terhadap kehidupan nelayan tradisional yang ada di pantai tersebut karena menurunnya produktivitas tenaga kerja nelayan dan pendapatan nelayan.

Dampak yang ditimbulkan oleh kerusakan ekosistem mangrove tidak dapat dilihat dalam waktu singkat. Menurunnya jumlah luasan hutan mangrove tidak serta merta menurunkan jumlah pendapatan nelayan. Penurunan jumlah hasil tangkapan nelayan dapat dilihat pada kurun waktu beberapa tahun setelah adanya kerusakan. Dampak kerusakan hutan mangrove dapat diketahui dengan mencari lokasi lain yang kondisi mangrovenya belum rusak.

Berdasarkan informasi dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lampung Selatan dan observasi langsung, Kecamatan Bakauheni berada tidak jauh dari Kecamatan Kalianda. Beberapa desa di pesisir pantai Kecamatan Bakauheni mempunyai vegetasi mangrove yang masih cukup rapat meskipun di kecamatan tersebut terdapat pembangunan pelabuhan dan budidaya perikanan. Di kecamatan Bakauheni terdapat nelayan tradisional yang juga menggantungkan hidupnya dari hasil penangkapan ikan.

Berdasarkan perbedaan keadaan di dua kecamatan tersebut, suatu penelitian dapat dilakukan untuk menjawab pertanyaan apa pengaruh rusaknya vegetasi mangrove terhadap produktivitas tenaga kerja nelayan dan pendapatan nelayan.

B. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh perbedaan kerapatan vegetasi mangrove di Kabupaten Lampung Selatan terhadap

1. produktivitas tenaga kerja nelayan tradisional,
2. pendapatan diatas biaya tunai yang diterima nelayan tradisional, dan
3. pendapatan diatas biaya total yang diterima nelayan tradisional.

C. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan berguna untuk

1. pemerintah dalam menyusun kebijakan, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan wilayah pesisir pantai, khususnya konservasi hutan mangrove,
2. investor atau pihak terkait, sebagai bahan informasi untuk ikut menjaga kelestarian lingkungan sebagai manivestasi dari tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan, dan
3. peneliti lain, sebagai referensi atau bahan pembanding.